

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Upaya kongkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Bandi (2014). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang

berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Mengemukakan bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* dipemerintahan daerah itu sendiri (Vincent, 2009).

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik (Hasbuan, dkk. 2013). Penyampaian laporan pertanggung jawaban itu merupakan salah satu bentuk agent kepada principal. Ketika terjadi kepentingan yang berbeda antara principal dan agent maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk menginterpretasikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Negara

(APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Komite standar akuntansi pemerintahan (2013) mengemukakan bahwa penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas dari laporan keuangan itu sendiri serta didukung oleh adanya transparansi dari laporan keuangan tersebut.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Mecling (2008) mengemukakan kualitas program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengembang amanat masyarakat bertanggung jawab atas kualitas yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Dalam hal indikator kualitas, sebagai dasar untuk

mengukur kualitas, di pakai indikator *input, output, atcome, benefit* dan *impact*. Dalam kenyataan, indikator yang dapat didefinisikan hanyalah input dan output, sedangkan indikator lainnya lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya (Marjiono, 2009).

Hal terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan untuk memadai bagi tercapainya: a.) Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara; b.) Keandalan laporan keuangan; c.) Pengamanan aset Negara; dan d.) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kompyurini dan Prasetyono (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan. Pemerintah kota Bone merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada pemerintahan teknologi informasi, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membentuk kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara dalam penelitian Dedi Rianto (2013) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu, serta pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.

Hal ini didukung oleh penelitian Nyoman Witra (2013) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam *agency theory* dalam hubungannya dengan mekanisme sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanatkan oleh prinsipal.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Soimah (2014), sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. Sehingga, harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Selain kapasitas sumber daya manusia yang bagus sistem pengendalian intern pemerintah pun harus sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yosefrinaldi (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Begitu juga dengan Ariesta (2013) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu, serta pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini karena dari beberapa periode, instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli mendapat predikat *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran pertanggung jawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bangli belum maksimal. Karena di mana di dalam instansi pemerintahan tersebut kurang memadainya komputer dan jaringan yang di sediakan di dalam pemerintahan tersebut sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, karena dimana pengguna informasi keuangan penting di lakukan karena pengguna data mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis.

Selain itu, kapasitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli masih jauh dari harapan, khususnya bagian pengelola keuangan yang terkait langsung dengan penggunaan teknologi informasi. Disamping itu, diketahui juga bahwa sistem pengendalian yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli masih kurang maksimal dalam pengawasan internal pegawai. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang pernah terjadi seperti pelanggaran indisipliner pegawai.

Menurut Vina (2009) mengemukakan bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandate dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* di pemerintahan daerah itu sendiri.

Menurut Ramadhani, dkk (2014) yang dikutip dalam Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel (2005) yang dikutip dalam Accounting Principles mengemukakan bahwa pengguna membutuhkan informasi yang rinci dan tepat waktu. Bagi para pengguna internal, akuntansi memberikan laporan-laporan internal. Selain itu, informasi yang telah diiktisarkan, disajikan dalam bentuk laporan keuangan agar memudahkan para pengguna dalam sistem informasi akuntansi dalam menerapkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui perkembangan laporan keuangan di dalam pemerintahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan. Penting untuk diteliti mengingat sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kualitas laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, Sistem

Pengendalian Internal Pemerintahan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

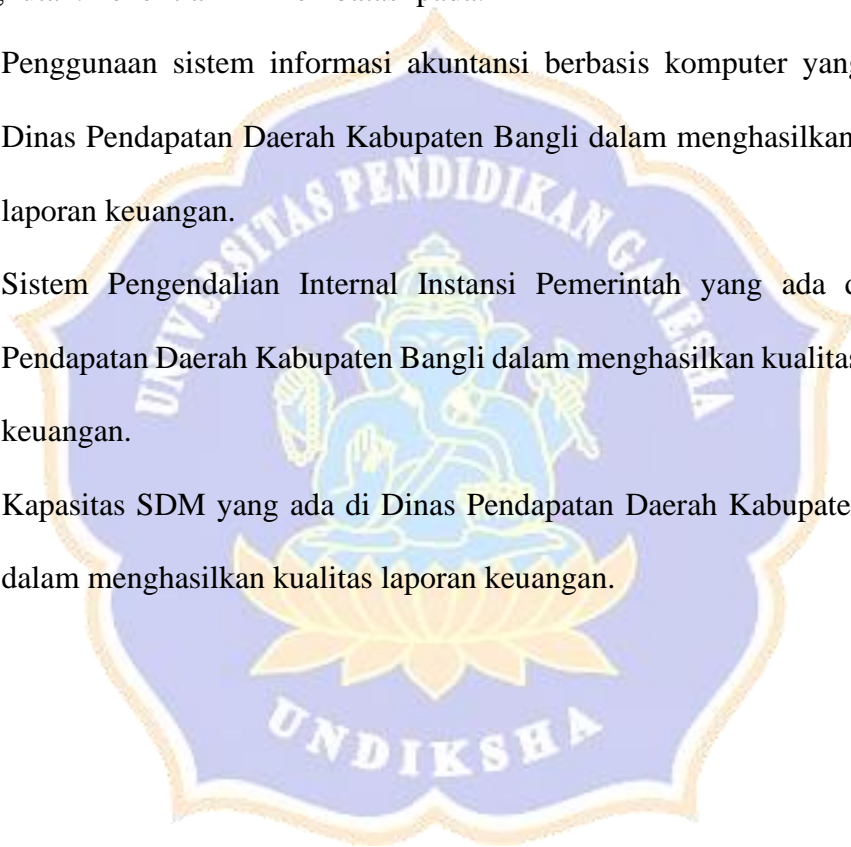
Penelitian ini membatasi pada instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli mendapat predikat *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran pertanggung jawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bangli belum maksimal. Karena di mana dalam instansi pemerintahan tersebut kurang memadainya komputer dan jaringan yang di sediakan di dalam pemerintahan tersebut sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, dimana

pengguna informasi keuangan penting di lakukan karena pengguna data mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis.

1.3 Pembatasan Penelitian

Pentingnya sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemerintahan sangat mempengaruhi hasil kualitas laporan pada instansi bersangkutan. Penelitian ini membatasi pada:

1. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan.
2. Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan.
3. Kapasitas SDM yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan.



1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli?
2. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli?
3. Apakah Kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli?
4. Apakah sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kapasitas SDM berpengaruh secara simultan dengan laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.
2. Untuk mengetahui pengaruh SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan) terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.

4. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kapasitas SDM secara simultan dengan laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan yang diuraikan diatas, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dalam mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan terkait sistem informasi akuntansi dan SPI pada instansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Kab. Bangli

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada instansi terkait untuk semakin mengoptimalkan SIA dan SPIP demi terwujudnya pelayanan yang maksimal dan *good governance*.

- b. Bagi Pengembang Sistem

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik dan handal bagi setiap instansi